PROPHETEIA
Jurnal Teologi Sistematika
ISSN XXXX-XXXX

Kantor Editorial: Jalan Paving Block Lingkungan 01 Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting
Kota Manado – Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia
Web: https://journal.gknpublisher.net/index.php/propheteia
e-mail: propheteiajurnal@gmail.com

PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA KONGREGASIONAL DALAM SIDANG KGPM SOLAGRATIA KIAWA

Erika Nandini Weleng, erikanandiniweleng@gmail.com
Institut Agama Kristen Negeri Manado

Irenne Misella Monigir, monigiriren34@gmail.com
Institut Agama Kristen Negeri Manado

Senkia Kurnia Senduk, Senkiasenduk09@gmail.com
Institut Agama Kristen Negeri Manado

Correspondence:
erikanandiniweleng@gmail.com

Vol.2 No.1 Bulan Januari Tahun 2026

Article History:
Submitted: 02 Jan 2026

Reviewed: 14 Jan 2026

Accepted: 30 Jan 2026

Pages: 37-44

Keywords:
Gereja, Kongregasional, Otonomi, Kolektif, KGPM. Church, Congregational, Autonomy, Collective, KGPM.

Copyright:
©2026, Authors.

License:

Abstract
This study discusses the development of the congregational church government system in the KGPM Solagratia Kiawa Session, a church in Kiawa 1 Jaga 2 Village, North Kawangkoan District, Minahasa Regency. The research was conducted on June 16, 2024 using qualitative methods. The KGPM Church adheres to a system of congregational government, which emphasizes the autonomy of local congregations and democratic participation in decision-making. This system allows all members of the congregation to be involved in determining church leaders and programs through voting. This research also traces the history of the congregational system that began with the Puritanism movement in England and developed in the United States. Nonetheless, there are strengths and weaknesses in this system, including broad congregational participation and potential slowdowns in the decision-making process. The results of the study show that KGPM applies the basic principles of the congregation with an emphasis on collective responsibility and democracy in the management of the church.

Abstrak
Penelitian ini membahas perkembangan sistem pemerintahan gereja kongregasional dalam Sidang KGPM Solagratia Kiawa, sebuah gereja di Desa Kiawa 1 Jaga 2, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa. Penelitian dilakukan pada 16 Juni 2024 menggunakan metode kualitatif. Gereja KGPM menganut sistem pemerintahan kongregasional, yang menekankan otonomi jemaat lokal dan partisipasi demokratis dalam pengambilan keputusan. Sistem ini memungkinkan seluruh anggota jemaat untuk terlibat dalam menentukan pemimpin dan program gereja melalui pemungutan suara. Penelitian ini juga menelusuri sejarah sistem kongregasional yang bermula dari gerakan Puritanisme di Inggris dan berkembang di Amerika Serikat. Meskipun demikian, ada kekuatan dan kelemahan dalam sistem ini, termasuk partisipasi luas jemaat dan potensi perlambatan proses keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KGPM menerapkan prinsip-prinsip dasar kongregasional dengan penekanan pada tanggung jawab kolektif dan demokrasi dalam pengelolaan gereja.

A. Pendahuluan

Gereja adalah tempat yang bisa memberikan setiap orang dapat menerima didikan rohani yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Alkitab. Menurut KBBI, gereja adalah gedung (rumah) tempat berdoa dan badan organisasi umat Kristen yang memiliki satu kepercayaan, ajaran dan tata cara ibadah. Gereja adalah organisasi, maka orang-orang yang mengatur gereja memiliki suatu wewenang dalam mengatur kehidupan bergereja karena di dalam gereja tidak hanya pendeta, tetapi ada majelis dan jemaat.[1]

Secara umum, "gereja" dapat diartikan sebagai sebuah institusi keagamaan atau organisasi yang terutama didedikasikan untuk pengajaran, ibadah, dan pelayanan kepada para penganut agama tertentu, khususnya dalam konteks Kekristenan. Gereja juga dapat merujuk pada bangunan fisik tempat ibadah atau komunitas umat beragama yang berkumpul untuk melakukan ritual, beribadah bersama, dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, dalam beberapa konteks, "gereja" bisa juga mengacu pada keseluruhan jemaat atau komunitas umat beragama yang terorganisir di bawah satu otoritas keagamaan. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani ekklesia yang berarti "yang dipanggil keluar".[2]

B. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneltian kualitatif adalah pendekatan penelitian atau analisis yang berfokus pada sifat-sifat kualitatif atau deskriptif suatu fenomena. Dalam penelitian kualitatif. peneliti berusaha untuk memahami dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam suatu fenomena, serta menggali persepsi, keyakinan, pengalaman, dan konteks sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Metode-metode yang sering digunakan dalam penelitian. kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis isi, analisis naratif, studi kasus, dan sebagainya. [3]

C. Hasil dan Pembahasan

Melalui hasil penelitian tentang perkembangan sistem pemerintahan gereja kongregasional di Sidang KGPM Solagratia Kiawa. Gbl. Rolly Liow M.Th memberikan penjelasan tentang perkembangan sistem pemerintahan gereja kongregasional. Dibawah ini pernyataan dari Gbl yang peneliti wawancarai : *Sistem pemerintahan di KGPM menganut sistem kongregasional. Kongregasi ini berasal dari Inggris, sifat pemerintahan gereja ini mengacu pada sistem kongregasi yang diterapkan waktu itu sebenarnya di inggris dimana segala keputusan di ambil oleh mereka yang ada di lingkungan jemaat dan masyarakat untuk mengantisipasi sistem pemerintahan yang berpusat kepada pemerintah. Setelah diambil oleh KGPM sebagai system pemerintahan gereja maka Sebetulnya system pemerintahan yang ada di KGPM itu, Kongregasi yang ada di KGPM itu tidak sepenuhnya mengadopsi sistem kongregasi yang ada di inggris itu dalam hubungan dengan sistem pemerintahan kongregasi yang ada di KGPM adalah sistem kongeregasi yang mengacu pada tanggung jawab jemaat terhadap keseluruhan kepentingan KGPM jadi bukan hanya*

[1] Adi Artanto, Gereja dan Misi-NYA: Mewujudkan Kehadiran Gereja dan Misi-Nya di Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2016), hh. 17.
[2] Yusak B. Setyawan, Eklesiologi, (Salatiga: Fakultas Teologi UKSW, 2013), hh.9.
[3] Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sulsel: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hh.6

menampilkan system organisasi gereja yang mengacu pada kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu tetapi kepentingan secarakeseluruhan.

Dengan demikian kongregasi KGPM adalah sistem kongregasi yang bertangung jawab secara keseluruhan karena itu sebagai gereja, KGPM telah menerapkan system kongregasi itu melalui, Contohnya apa bila ada Sidang Raya melibatkan semua sidang -sidang dan ketika ada di sidang kongregasi yang di terapkan di KGPM adalah di mana Seluruh anggota sidi di libatkan untuk pengambilan keputusan baik menyangkut penentuan pemimpin, Menentukan program di putuskan secara bersama-sama itu yang di pahami di KGPM.

Definisi Gereja

Kata Gereja berasal dari kata Portugis yaitu igreya, namun saat ini lebih sering menggunakan kata Ekklesia dari bahasa Yunani, artinya Tuhan sebagai nenek moyang mereka. Satu hal yang dapat dipahami sebagai "milik Tuhan" adalah mereka yang mengakui Yesus sebagai Anak Tuhan. Satu-satunya hal yang berhubungan dengan Gereja adalah orang yang beriman, kata gereja tidak berhubungan dengan isinya, melainkan dengan orangnya. Menurut tradisi Yunani, "ekklesia" mengacu pada jemaat atau gereja yang digunakan pada Abad Pertengahan untuk menggambarkan sekelompok orang, baik prajurit atau manusia. Kata kerja ekklesia, yang terdiri dari dua suku kata yaitu ek = keluar dari, kaleo = memanggil. Yang berarti "memanggil keluar."[4]

Menurut Dr. Berkhof, tujuan gereja adalah untuk menyebarkan Injil dan karya keselamatan Allah ke seluruh dunia. Namun, Dr. Enklaar mengatakan bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya bersama dengan Kristus. Dia menggambarkan gereja sebagai perkumpulan, perhimpunan, dan persekutuan dengan Kristus. Tujuannya adalah untuk mendamaikan dan memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang telah rusak karena dosa. Gereja adalah sebuah komunitas unik dari orang-orang yang percaya kepada-Nya, yang bergabung sebagai bersekutu di bawah naungan Yesus Kristus. Karya Yesus Kristus yang disampaikan kepada manusia dianggap sebagai Firman dan pedoman hidup.[5]

Sebagai kelompok orang yang beragama, gereja dipanggil untuk menjalankan suatu kehidupan yang sesuai dengan tuntutan kerajaan Allah (Markus 1:15; Efesus 4:11; 2 Petrus 1:10-11). Dipandu oleh Roh Allah, yang menghasilkan kasih, kegembiraan, kedamaian , keadilan, dan kebenaran, adalah cara hidup yang sesuai dengan tuntutan kerajaan Allah (Efesus 5:3 dst; Galatia 5:21). Gereja sebagai persekutuan orang percaya adalah persekutuan yang kuat dan tahan uji yang tetap berharap kepada Yesus Kristus sambil menghadapi tantangan, penderitaan, dan godaan.[6] Gereja juga dipanggil untuk berkhotbah dan memberitakan Kerajaan Allah dengan setia dan setia dalam melayani kasih, kebenaran, keadilan, dan kedamaian bagi semua orang .[7] Menurut Hoon dalam bukunya James F. White, mengatakan bahwa ibadah adalah bentuk penyataan diri Allah dalam Yesus Kristus dan tanggapan manusia terhadapNya. Melalui FirmanNya, Allah menyingkapkan dan mengkomunikasikan keberadaanNya dan ajaranNya kepada manusia.[8]

Sejarah Gereja Kongregasional

[4] William W. Menzies, Doktrin Alkitab (Malang Gandum Mas, 1998) hh.159
[5] Clifford Green: diterjemahkan oleh Marie-Claire Barth. *Karl Bart: Teologi Kemerdekaan.* (Jakarta: BPK gunung Mulia , 2003), hh 292.
[6] Gerald Bray . Gereja: *Catatan Teologis dan Sejarah*. (2009), hh, 25.
[7] Keputusan Sidang Raya XII PGI, *Lima Dokumen Keesaan Gereja di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1944), hh52.
[8] James, F, White, *Pengantar ibadah kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hh, 7.

Sistem pemerintahan gereja sistem pemerintahan gereja secara "Kongregasional" juga tidak bisa dilepaskan dari peristiwa besar terjadinya reformasi gereja pada abad ke-16. Nama "Kongregasional" mula-mula muncul dalam suatu perkumpulan di Skotlandia (Desember 1557), anggota-anggota dari perkumpulan ini menyebut diri mereka"Congregation of The Lord". Maksud mereka dengan aktivitas-aktivitasnya bukan untuk membasmi Gereja-Negara di Inggris pada waktu itu. Pendiri dari Kongregasional ialah Robert Browne (1550-1633), sesudah menyelesaikan studinya pada"Corpus Christi College"di Cambridge", ia beberapa waktu lamanya bekerja sebagai pengajar di sekitar kota London. Kemudian, ia kembali ke Cambridge dan berkhotbah di berbagai tempat di kota itu. Ia tidak bersedia untuk diangkat dan ditahbiskan menjadi rohaniawan dari Gereja Anglikan. Ia memilih menjadi pemimpin dari suatu kelompok orang, yang memisahkan dari Gereja Anglikan dan membentuk suatu "kongregasi"sendiri.

Robert Browne selanjutnya digantikan oleh Henry Barrow, seorang pengacara yang bertobat. Sama seperti John Green Wood ia beberapa waktu lamanya bekerja sebagai pemimpin kongregasi di Inggris, tetapi keduanya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kondisi yang demikian membuat para pengikutnya (para anggota kongregasi) mengambil keputusan untuk berimigrasi. Mula-mula mereka pergi ke Belanda, tetapi kemudian mereka berimigrasi ke Amerika. Dapat dikatakan bahwa akar utama dari gereja kongregasional (misalnya Gereja Baptis) adalah gerakan Puritanisme di Inggris yang berkembang pada akhir abad ke-16 karena ketidakpuasan dengan kondisi Gereja Negara (Gereja Anglikan). Mereka tidak puas dengan perkembangan reformasi di dalam Gereja Anglikan dan berkerinduan untuk membersihkan gereja dari semua unsur Katolik, oleh karena itu mereka disebut orang Puritan. [9]

Gerakan Kongregasional yang waktunya tidak berbeda jauh dari gerakan reformasi yang digerakan oleh Martin Luther, John Calvin dkk, maka tidak mengherankan jika ajaran para pengikut kongregasional berhubunganan erat dengan ajaran Gereja-gereja Reformed atau Presbiterian. Bertolak dari Inggris, ke Belanda selanjutnya gereja-gereja Kongregasional (abad ke-17) akhirnya berkembang secara luas di Amerika Serikat. Di bawah Cromwell (1599-1658) para anggota dari Gereja-gereja Kongregasional memeroleh suatu posisi yang kuat. Hal ini mendorong mereka kepada suatu organisasi yang lebih ketat dan mengikat. Pada tahun 1648 mereka berhasil menyusun "Cambridge Platform, yang terdiri dari 17 pasal, dan pada tahun 1658 menyusun "Savoy Decleration of Faith and Order", sebagai hasil dari konperensi atau sinode di Sovony, yang dihadiri oleh 200 wakil dari 120 Gereja Kongregasional. Di antara denominasi- denominasi besar yang mempraktikkan sistem pemerintahan kongregasional adalah Gereja Baptis, Gereja Kongregasional, dan kebanyakan kelompok Luteran.

Prinsip-prinsip Dasar Kongregasional

Berikut ini akan diuraikan beberapa prinsip dasar dari bentuk pemerintahan gereja secara Kongregasional:

Otonomi Gereja Lokal

Pemerintahan gereja secara Kongregasional adalah lebih menekankan peran setiap anggota jemaat sehingga menjadikan jemaat lokal pimpinan tertinggi. Setiap jemaat lokal mempunyai otonomi yang mutlak dan tidak dibawah atau di atas dari jemaat lokal yang lain. Maksudnya dengan otonomi ialah bahwa jemaat lokal itu berdiri bebas dan mengatur dirinya sendiri. Prinsip otonomi berarti bahwa setiap gereja lokal dapat mengatur dirinya sendiri. Setiap jemaat mengangkat gembala sidangnya sendiri serta menentukan sendiri anggaran belanjanya. Gereja

[9] Ichwei G. Indra, *Identitas Baptis* (Surabaya: Pelayanan Mandiri "Mikhael", 2008,) hh 3.

lokal membeli dan memiliki sendiri semua iventaris tanpa bertanggung jawab kepada pihak manapun di luar jemaat lokal. Gereja Lokal bisa meminta nasihat kepada gereja yang lain atau pejabat denominasinya di luar jemaat lokal, sekalipun demikian gereja lokal tetap tidak berkewajiban untuk mentaati nasihat tersebut, dan di dalam keputusannya tidak membutuhkan pengesahan atau persetujuan dari pihak mamnapun yang berada di luar gereja lokal. [10]

Pemerintahan gereja secara Kongregasional adalah lebih menekankan peran setiap anggota jemaat sehingga menjadikan jemaat lokal pimpinan tertinggi. Setiap jemaat lokal mempunyai otonomi yang mutlak dan tidak dibawah atau di atas dari jemaat lokal yang lain. Maksudnya dengan otonomi ialah bahwa jemaat lokal itu berdiri bebas dan mengatur dirinya sendiri.

Prinsip otonomi berarti bahwa setiap gereja lokal dapat mengatur dirinya sendiri. Setiap jemaat mengangkat gembala sidangnya sendiri serta menentukan sendiri anggaran belanjanya. Gereja lokal membeli dan memiliki sendiri semua iventaris tanpa bertanggung jawab kepada pihak manapun di luar jemaat lokal. Gereja Lokal bisa meminta nasihat kepada gereja yang lain atau pejabat denominasinya di luar jemaat lokal, sekalipun demikian gereja lokal tetap tidak berkewajiban untuk mentaati nasihat tersebut, dan di dalam keputusannya tidak membutuhkan pengesahan atau persetujuan dari pihak mamnapun yang berada di luar gereja lokal.[11]

Demokrasi

Prinsip penting yang diterapkan dalam pemerintahan gereja secara Kongregasional adalah menekankan orang perorangan di dalam gereja, seperti demokrasi politik. Sebagian besar keputusan ditentukan melalui pemungutan suara dari semua anggota gereja. Tentang hal ini Millard J. Erickson mengatakan sebagai berikut: "Tidak ada kekuasaan di luar gereja lokal tersebut yang dapat mendikte perilakunya. Yang dimaksudkan dengan demokrasi ialah bahwa setiap anggota gereja memiliki hak suara. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan anggota jemaat lokal. Wewenang tertinggi tidak ada ditangan tokoh atau kelompok tertentu." Konsep demokrasi berarti bahwa wewenang di dalam jemaat lokal berada di tangan setiap anggota jemaat. Pandangan ini sangat menekankan imamat semua orang percaya. Setiap orang percaya dapat langsung menghampiri hadirat Allah tanpa perantara. Sebagaimana yang diingatkan oleh Paulus, setiap anggota atau bagian dari tubuh Kristus memiliki peranan yang menentukan baik kesejahteraan tubuh itu sepenuhnya.

Hubungan dengan Gereja Lain Satu Denominasi

Setiap jemaat dapat mengadakan penggabungan kerjasama tertentu dengan pihak lain, tetapi bentuk kerjasama tersebut bersifat sukarela. Penggabungan semacam ini dianggap menguntungkan karena beberapa alasan: Pertama, penggabungan ini mewujudkan bentuk kesatuan yang ada di dalam gereja yang tidak kelihatan. Kedua, penggabungan tersebut menyediakan dan meningkatkan persekutuan Kristen dalam jangkauan yang lebih luas daripada yang dimungkinkan dalam satu jemaat lokal. Ketiga, penggabungan tersebut memungkinkan pelayanan dalam tingkat yang lebih efektif daripada yang dapat dilakukan oleh gereja lokal itu sendiri. Pelaksanaan pemberitaaan Injil, pendirian jemaat lokal yang baru, serta kegiatan pemuda pemudi merupakan kegiatan yang lebih efektif apabila dilaksanakan dalam taraf yang lebih luas daripada jemaat lokal. Mengikuti dan mengikatkan diri dalam kelompok-kelompok semacam itu

[10] Sunarto, "Perbandingan Antara Bentuk Presbiterian Dan Kongregasional Dalam Pemerintahan Jemaat," TE DEUM 3 (1) (2013): hh. 53-58

[11] Millard J. Erickson, *Teologi Kristen*, Volume Tiga (Malang: Gandum Mas, 2004), hh 355.

bersifat sukarela, sebuah jemaat lokal berhak mengakhiri setiap bentuk kerjasama apabila diinginkan. Tidak ada satu kelompok atau pihak manapun yang berhak mengatur penyelenggaraan sebuah gereja lokal. Pemilihan suara dilakukan dengan dasar perwakilan, pada umumnya sesuai dengan besarnya gereja lokal yang terlibat dalam bentuk kerjasama tersebut. Jadi pemerintahan di daerah atau di pusat hanya berfungsi sebagai penasihat dan hanya bertugas mengkoordinasikan pelayanan penginjilan bersama, pendidikan dan lain-lain yang semacam itu.

Fungsi-fungsi Para Pejabat Gereja

Para pejabat gereja yang dimaksud disini adalah pendeta, penatua (majelis) dan diaken). Di dalam gereja hanya satu otoritas, yaitu Kristus dan Kitab Suci. Kristus memberikan otoritas kepada kongregasi atau kepada anggota-anggota kongregasi secara individu. Pejabat-pejabat tidak memerintah, mereka hanya melayani. Satu-satunya yang memerintah ialah Kristus. Kepada seluruh kongregasi, baik pejabat-pejabat, maupun anggota-anggota kongregasi harus memberikan pertangung jawaban. Tugas penatua-penatua yang menurut ketetapan Allah dipanggil oleh kongregasi ialah: menggembalakan anggota-anggota kongregasi. Tugas itu mereka harus tunaikan sebagai hamba, bukan sebagai tuan.[12]

Penatua dan Gembala, Istilah "tua" dan "penatua" memiliki arti ganda. Tua-tua adalah kata yang benar-benar mengacu pada usia, dan tua-tua atau penatua adalah kata yang mengacu pada posisi dalam pemerintahan gereja. Memang pada awalnya, orang yang lebih tua dan sesuai usia diangkat menjadi penatua. Karena orang tua dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk memimpin dan memerintah gereja. "Penatua-penatua itu baru muncul di periode kedua, ketika Petrus dan Jakub menyerahkan kepemimpinannya kepada gereja," itu menurut dari Bolkestein.[13] Menurut Rullmann, para penatua telah ada sejak Paulus dan Barnabas memberitakan Injil dan memilih para pemimpin dan penatua di setiap sidang jemaat. Selain itu, para episkopos juga disebut sebagai ketua.[14]

Rullmann menyatakan bahwa tugas utama para penatua adalah menggembalakan sidang. Pada saat itu, rasul-rasul, nabi-nabidan, dan guru-guru ditugaskan untuk mengajar dan mengajar. Menurut Rullmann, pada saat itu, pendidikan dan pengajaran masih didasarkan pada kharisma yang dimiliki oleh para rasul, nabi, dan guru. Akan tetapi, beberapa lama kemudian, tanggung jawab mengajar dan mendidik diberikan kepada para penatua, yang berfungsi sebagai gembala-gembala sidang. Lebih jauh lagi, hal itu menjadi jelas dalam 1 Timotius 3:5, bahwa seorang pendeta jemaat harus " bisa mengajar orang". Oleh karena itu, ada dua jenis penatua: yang pertama adalah penatua yang melakukan pekerjaan yang biasa mereka lakukan, yaitu memerintah dan memimpin gereja, dan yang kedua adalah penatua yang memberi firman Tuhan dan mengajar orang lain, juga dikenal sebagai pendeta. Jadi, jabatan penatua sebenarnya berasal dari pendeta.[15]

Dasar Alkitab Bentuk Kongregasional

Gereja perdana atau yang disebut Gereja mula-mula sebagaimana yang tercatat dalam Kisah Para Rasul, sejak awal seluruh jemaat memilih orang-orang untuk menduduki jabatan tertentu serta ikut serta menentukan kebijaksanaan gereja. Mereka memilih pengganti Yudas Iskariot (Kis 1). Mereka memilih para diaken yang pertama (Kisah 6). Sekalipun tidak ada

[12] L. Ch. Abineno, Garis-Garis Besar Hukum Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), hh, 86-87.
[13] M.H. Bolkestein. *Azas-azas hukum gereja*, trans. P.W. Situmeang dan A. Simandjutak. (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1966), hh, 30
[14] J.A.C. Rullmann, *Peraturan Gereja,* trans, E.I Sukarso (Jakarta: Taman Pustaka Kristen, 1956), hh, 17.
[15] Ibid Bolkestein, hh, 30.

pernyataan yang jelas pada waktu Paulus dan Barnabas diutus dalam suatu tugas pelayanan (Kis 13:1-3), tetapi sewaktu mereka kembali ke Antiokhia mereka memberikan laporang kepada seluruh jemaat (Kis 14:27). Pada waktu di jemaat ada persoalan masalah pengajaran, seluruh gereja mengutus Paulus dan Barnabas ke Yerusalem untuk untuk membantu persoalan tentang sunat (Kis 15:2-3). Demikian pula yang mengirim jawaban adalah seluruh jemaat Yerusalem. Demikian ditulis dalam Kisah Para Rasul 15:22 sebagai berikut: Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. [16] Yesus mengecam para murid yang berusaha untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi di atas sesama saudaranya. Ketika murid-murid-Nya berselisih siapa di antara mereka yang terbesar, Yesus berkata kepada mereka: Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan (Luk. 22:25-27). Berdasarkan nas tersebut sesungguhnya seorang pemimpin adalah seorang hamba dari semuanya. Sebuah pemahaman yang benar tentang pelayanan akan muncul apabila seorang pemimpin sadar bahwa mereka dipilih oleh orang-orang yang harus merela layani dan bertanggung jawab kepada mereka.[17]

Kekuatan Bentuk Kongregasional

Hakikatnya bentuk pemerintahan gereja secara Kongregasional sangat menekankan peran anggota jemaat secara orang perorangan. Semua anggota jemaat memiliki suara yang sama, tanpa peduli status sosial, ekonomi dan pendidikan mereka. Sistem pemerintahan gereja yang demikian jelas menghindarkan keotoriteran (kedikatoran) dari seorang pendeta. Disamping pendeta dan ada beberapa orang tertentu yang dipilih secara bebas oleh jemaat untuk melakukan tugas-tugas khusus. Hakikatnya dalam pemerintahan gereja, mereka adalah wakil dan hamba dari gereja. Mereka tidak dapat melaksanakan kekuasaan mereka secara bebas atau berlawanan dengan kehendak gereja lokal. Kalau mereka berbuat diluar aturan dapat diberhentikan darijabatannya tersebut. Semua keputusan penting harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota jemaat.

Kelemahan Bentuk Kongregasional

Keberatan terhadap sistem Kongregasional ialah bahwa sistem ini mengabaikan bukti- bukti Alkitab mengenai wibawa rasuli. Dalam persidangan di Yerusalem yang bersidang adalah para rasul dan para penatua, bukan seluruh jemaat. Contoh yang lain, misalnya Paulus pernah mengangkat beberapa penatua (Kisah 14:23) serta menyuruh Titus untuk melakukan hal yang sama (Titus 1:5). Dalam tataran yang praktis apabila semua hal harus dibicarakan dan memerlukan persetujuan anggota jemaat membuat pelayanan menjadi lambat. Sedangkan untuk beberapa kasus harus memerlukan penanganan dan keputusan yang cepat. Pembahasan masalah doktrinal apabila harus dibicarakan dengan melibatkan seluruh jemaat yang memiliki pemahaman teologi yang dangkal atau sama sekali awam akan membawa hasil yang kurang baik.

[16] Edwin Gaustad. Kesalehan Baptis: Wasiat Terakhir dan Kesaksian Obaja Holmes. Arno Press, 1980, hh, 24
[17] Ibid, hh, 60-61

D. Kesimpulan

KGPM merupakan organisasi gereja yang memiliki cara sendiri dalam mengambil keputusan demi jalannya organisasi. Organisasi yang memiliki sistem pemerintahan gereja Kongregasionaliesme (dari bawah ke atas) maksudnya dalam mengambil keputusan harus melalui suatu pertemuan persidangan atau rapat. Dimana dalam implementasinya sebagai gereja yang menganut Kongresional, KGPM mengambil keputusan bersama dengan jemaat/ sidang dalam suatu pertemuan sidang raya sebagai forum tertinggi dalam KGPM dan sidang tahunan. Walaupun sistem pemerintahan gereja yang di pegang KGPM adalah kongregasional, namun ada beberapa keputusan yang dapat diambil oleh pimpinan lembaga tertinggi KGPM sesuai dengan peraturan gereja yang ada, namun dengan tidak mengesampingkan amanat sidang raya. Keputusan yang apat diambil oleh lembaga tertinggi KGPM sudah tertata di dalam peraturan KGPM melalui tugas dan fungsi pokok masing-masing lembaga tertinggi.

E. Referensi

Abineno, L. Ch. *Garis-Garis Besar Hukum Gereja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1994

Artanto, Adi. *Gereja dan Misi-NYA: Mewujudkan Kehadiran Gereja dan Misi-Nya di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2016)

Bolkestein. M. H. *Azas-azas hukum gereja*, trans. P.W. Situmeang dan A. Simandjutak. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.1966

Clifford Green: diterjemahkan oleh Marie-Claire Barth. *Karl Bart: Teologi Kemerdekaan.* Jakarta: BPK gunung Mulia. 2003

Edwin Gaustad. Kesalehan Baptis: Wasiat Terakhir dan Kesaksian Obaja Holmes. Arno Press, 1980.

Erickson, Milliard. J. *Teologi Kristen*, Volume Tiga. Malang: Gandum Mas. 2004

Gerald Bray . Gereja: *Catatan Teologis dan Sejarah*". (2009),

Ichwei G. Indra, *Identitas Baptis*. Surabaya: Pelayanan Mandiri "Mikhael". 2008.

James, F, White, *Pengantar ibadah kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2002

Keputusan Sidang Raya XII PGI, *Lima Dokumen Keesaan Gereja di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1944

Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sulsel: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019

Rullmann, J.A.C. *Peraturan Gereja,* trans, E.I Sukarso. Jakarta: Taman Pustaka Kristen. 1956

Sunarto, "Perbandingan Antara Bentuk Presbiterian Dan Kongregasional Dalam Pemerintahan Jemaat," TE DEUM 3 (1) (2013)

Yusak B. Setyawan, *Eklesiologi*, (Salatiga: Fakultas Teologi UKSW, 2013)

William W. Menzies, *Doktrin Alkitab*. Malang Gandum Mas. 1998.